

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR **BADAN KEUANGAN DAERAH** SEKRETARIAT

publik yang dikecualikan.

	Nomor SOP	41 Tahun 2024		
	Tanggal Pembuatan	12 Mei 2023		
THE THUSARA THUS	Tanggal Revisi	23 Oktober 2024		
	Tanggal Efektif	ZO ORIODOI ZOZ I		
	Disahkan oleh	Plt./Kepala Badan Keuangan Daerah		
	Diodrikari olori	Provinsi Nusa Tenggara Timur		
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BADAN KEUANGAN DAERAH		Drs. Benhard Menoh, MT		
		Pembina Tingkat I		
SEKRETARIAT		NIP 19720512 199101 1 001		
	Judul SOP	Pendokumentasian Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan		
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana :			
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Pendidikan minimal Sarjana			
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2. Memahami Pendokumentasian, Kearsipan, dan Pengelolaan Informasi			
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Memahami dan menguasi teknologi informasi			
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan				
5. Keputusan Gubernur NTT Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan				
Dokumentasi Provinsi NTT				
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapar	1:		
SOP Penanganan Surat Masuk	1. ATK.			
SOP Pengujian Tentang Konsekuensi	2. Komputer.			
3. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik	3. Internet			
4. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan	4. Printer.			
Peringatan	Pencatatan dan pendat			
Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka berdampak pada pendokumentasian informas	si Disimpan dalam bentuk	Softcopy dan Hardcopy.		

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku				
		Ketua PPID	Sekretaris PPID	Bidang - Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Memerintahkan Sekretaris PPID untuk mengumpulkan informasi publik yang dikecualikan yang sudah ditetapkan.	Mulai			Agenda Kerja	10 Menit	Agenda Kerja	
2	Mengumpulkan informasi publik yang dikecualikan pada bidang yang bertanggungjawab.		<u> </u>		Agenda Kerja	2 Hari	Agenda Kerja	
3	Memberikan softcopy informasi publik yang dikecualikan, jika informasi yang diminta sudah sampai pada batas waktu pengecualian. Jika tidak maka meminta sekretaris PPID untuk menunggu sampai pada batas waktu yang ditentukan.		Tidak	\rightarrow	Agenda Kerja	Tentatif	Softcopy dokumen informasi publik yang dikecualikan	
4	Menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk softcopy dalam stroge internal PPID		Selesai	Ya	Softcopy dokumen informasi publik yang dikecualikan	15 Menit	Soft file	